Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlangsungan Pendidikan Mahasiswa Universitas Semarang Ditinjau dari Aspek Pancasila

Aziz Pijar Lazuardi, Eni Kamilatun Nisa, Muhammad Akmal Amrullah
Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Semarang, Indonesia
Email Korespondensi: zizpijar@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan tinggi merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberlangsungan pendidikan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa Universitas Semarang ditinjau dari perspektif Pancasila. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 10 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang angkatan 2025 dengan instrumen berupa tujuh pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya mampu meringankan beban biaya pendidikan dan memenuhi kebutuhan mahasiswa, khususnya dari kalangan menengah. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan kebijakan masih rendah dan transparansi informasi dinilai belum optimal. Berdasarkan perspektif Pancasila, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, memperluas akses bantuan pendidikan, serta melibatkan mahasiswa secara lebih aktif dalam pengambilan kebijakan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, pendidikan tinggi, keberlangsungan pendidikan, perspektif Pancasila, mahasiswa

ABSTRACT

Higher education is a crucial aspect of developing high-quality human resources. The continuity of students' education is influenced by various factors, including government policies in the educational, economic, and social sectors. This study aims to analyze the impact of government policies on the continuity of education for Universitas Semarang students, viewed through the lens of Pancasila principles. A quantitative research method utilizing a survey approach was employed. Data were collected through an online questionnaire distributed to ten students from the Faculty of Psychology, Universitas Semarang, Class of 2025. The findings indicate that government policies have not yet fully succeeded in alleviating the financial burden of education or meeting students' needs, particularly for those from middle-income backgrounds. Furthermore, student involvement in the policy-formulation process remains low, and the transparency of information regarding government policies is considered suboptimal. Therefore, from the perspective of Pancasila, the government needs to improve the effectiveness of educational policies, expand access to educational financial aid, and involve students more actively in the decision-making processes related to higher education.

Keyword: government policy, higher education, educational continuity, Pancasila perspective, students).

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memegang peranan krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berintegritas. Di Indonesia, kebijakan pemerintah menjadi fondasi utama dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlangsungan pendidikan tinggi, termasuk bagi mahasiswa Universitas Semarang. Kebijakan yang diambil pemerintah, baik berupa regulasi, pendanaan, maupun program pengembangan, sangat berpengaruh terhadap akses pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu akademik.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan semakin kompleks, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif agar mahasiswa dapat berkembang secara optimal. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk seharusnya berpihak kepada pelaksana kebijakan sehingga akan mengurangi terjadinya konflik antara pemangku dan pelaksana. Dalam hal ini, pelaksana adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa elemen, khususnya dari elemen mahasiswa yang merupakan elemen krusial di tengah masyarakat sebagai calon penerus generasi bangsa yang perlu diperhatikan khusus segala kebutuhannya.

Namun, implementasi kebijakan pemerintah sering kali menemui berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, hingga kurangnya sosialisasi program kepada mahasiswa. Hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan pendidikan, mulai dari kesulitan memperoleh beasiswa, keterbatasan fasilitas belajar, hingga berkurangnya motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung atau justru menghambat proses pendidikan di Universitas Semarang, serta mencari solusi agar setiap mahasiswa memperoleh hak pendidikan yang layak dan berkualitas demi kemajuan bangsa.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang angkatan 2025, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden menilai kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu meringankan beban biaya pendidikan maupun memenuhi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam forum atau proses perumusan kebijakan masih relatif rendah, sementara transparansi informasi mengenai kebijakan pendidikan juga dinilai belum optimal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh mahasiswa sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa Universitas Semarang ditinjau dari perspektif Pancasila. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah maupun institusi pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berpihak pada keberlangsungan pendidikan mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan, tindakan, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik serta mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah berperan dalam mengatur sistem pendidikan, pembiayaan, pemerataan akses, peningkatan mutu, hingga perlindungan terhadap hak-hak peserta didik.

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, subsidi biaya pendidikan, serta program yang bertujuan meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses perumusannya, tetapi juga oleh implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebuah kebijakan

dikatakan efektif apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok sasaran. Sebaliknya, apabila implementasi kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau kurang melibatkan partisipasi publik, maka tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa.

2.2 Keberlangsungan Pendidikan Mahasiswa

Keberlangsungan pendidikan merupakan kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan proses studinya hingga menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditempuh. Keberlangsungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri mahasiswa maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi belajar, kemampuan akademik, serta kondisi psikologis, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi keluarga, dukungan sosial, lingkungan kampus, serta kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor yang banyak memengaruhi keberlangsungan pendidikan mahasiswa adalah aspek ekonomi. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan membayar biaya kuliah, memenuhi kebutuhan akademik, maupun biaya hidup sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, kebijakan pemerintah berupa bantuan pendidikan, beasiswa, maupun subsidi biaya kuliah menjadi faktor penting yang dapat membantu mahasiswa mempertahankan keberlangsungan studinya.

Selain aspek ekonomi, transparansi informasi mengenai kebijakan pendidikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang mudah diakses memungkinkan mahasiswa memahami berbagai program pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan mereka. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan karena pemerintah memperoleh masukan langsung dari kelompok yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

2.3 Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan moral dalam penyusunan berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berkepribadian, dan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga sila Pancasila yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pendidikan. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nilai ini sejalan dengan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Selanjutnya, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan bahwa pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan tanpa membedakan latar belakang ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan tinggi seharusnya disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh mahasiswa. Implementasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Objek penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Semarang sebagai responden utama. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan *Google Form* yang memuat 7 butir pernyataan dengan pilihan jawaban setuju atau tidak setuju terkait persepsi, pengalaman, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan pendidikan mahasiswa. Pengisian

kuesioner dilakukan secara sukarela oleh mahasiswa dari berbagai program studi dan angkatan, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan gambaran umum situasi aktual di lingkungan Universitas Semarang.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengetahui pola, kecenderungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam merespons kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan memaparkan hasil dalam bentuk persentase, diagram, dan narasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kehidupan pendidikan mahasiswa Universitas Semarang. Selain itu, studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel dengan rentang waktu publikasi 5 tahun terakhir, juga digunakan untuk memperkuat hasil temuan dari data kuantitatif dan memberikan konteks yang lebih luas dalam pembahasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 10 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang angkatan 2025. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring yang terdiri atas tujuh pernyataan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Seluruh jawaban dianalisis secara deskriptif berdasarkan persentase responden, kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori kebijakan pemerintah, keberlangsungan pendidikan, dan nilai-nilai Pancasila.

4.1 Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Meringankan Biaya Pendidikan

Pernyataan pertama bertujuan mengetahui apakah mahasiswa merasa kebijakan pemerintah saat ini telah membantu meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa dari kalangan menengah. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 30% responden menyatakan setuju, sedangkan 70% responden menyatakan tidak setuju.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih menilai kebijakan pemerintah belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan beban biaya pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program bantuan pendidikan yang telah diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan mahasiswa, terutama mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah.

Berdasarkan teori kebijakan publik, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Tingginya persentase responden yang tidak setuju menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih memerlukan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Dari perspektif Pancasila, kondisi tersebut berkaitan dengan Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tanpa adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi.

4.2 Pengaruh Bantuan Pendidikan terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa

Pernyataan kedua bertujuan mengetahui apakah kebijakan subsidi atau bantuan pendidikan pemerintah memengaruhi kemampuan mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi di Universitas Semarang. Hasil survei menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan setuju dan 50% responden menyatakan tidak setuju.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa pengaruh bantuan pendidikan terhadap keberlangsungan studi masih beragam. Sebagian mahasiswa merasa bantuan pendidikan memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan kuliah, sementara sebagian lainnya merasa bantuan tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kondisi ekonomi mereka.

Perbedaan persepsi ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi masing-masing mahasiswa. Mahasiswa yang memperoleh bantuan pendidikan cenderung merasakan manfaat secara langsung, sedangkan mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan kemungkinan tidak merasakan dampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

4.3 Dampak KebijakanPemerintah terhadap Kondisi Keuangan Mahasiswa

Pernyataan ketiga bertujuan mengetahui apakah mahasiswa pernah mengalami kendala keuangan akibat perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil survei, 40% responden menyatakan setuju, sedangkan 60% responden menyatakan tidak setuju.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum merasakan dampak langsung terhadap kondisi keuangan akibat perubahan kebijakan pemerintah. Namun demikian, masih terdapat hampir setengah dari jumlah responden yang mengaku mengalami kendala keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah tidak dirasakan secara merata oleh seluruh mahasiswa. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, sumber pendapatan, maupun kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan kesenjangan di kalangan mahasiswa.

4.4 Persepsi Mahasiswa terhadap Keadilan Kebijakan Pemerintah

Pernyataan keempat bertujuan mengetahui apakah mahasiswa menilai kebijakan pemerintah telah memperhatikan kebutuhan mahasiswa dari kalangan menengah secara

adil dibandingkan kelompok lainnya. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan tidak setuju.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memandang kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian yang proporsional terhadap kelompok masyarakat menengah. Kelompok ini sering kali berada pada posisi yang kurang diuntungkan karena tidak termasuk kategori masyarakat miskin yang memperoleh berbagai bantuan, namun juga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menanggung seluruh biaya pendidikan secara mandiri.

Apabila ditinjau berdasarkan nilai Pancasila, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial masih perlu diperkuat dalam penyusunan kebijakan pendidikan sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi.

4.5 Peran Pemerintah dalam Mendukung Mahasiswa

Pernyataan kelima berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan akses pekerjaan paruh waktu maupun beasiswa tambahan bagi mahasiswa Universitas Semarang. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa masih menilai dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas penunjang pendidikan belum optimal. Padahal, kesempatan memperoleh pekerjaan paruh waktu maupun bantuan pendidikan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga keberlangsungan studi mahasiswa, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerintah bersama perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan program magang, pekerjaan paruh waktu, maupun beasiswa yang dapat diakses secara lebih luas oleh mahasiswa.

4.6 Transparansi Informasi Mengenai Kebijakan Pemerintah

Pernyataan keenam bertujuan mengetahui apakah informasi mengenai kebijakan pemerintah telah disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh mahasiswa. Hasil survei menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan setuju dan 50% responden menyatakan tidak setuju.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya efektif. Sebagian mahasiswa telah memperoleh informasi dengan baik, sedangkan sebagian lainnya merasa kesulitan memperoleh informasi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Transparansi informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Informasi yang mudah diakses akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan maupun evaluasi kebijakan.

4.7 Partisipasi Mahasiswa dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pernyataan ketujuh bertujuan mengetahui apakah mahasiswa pernah terlibat dalam forum diskusi atau survei yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan tidak pernah terlibat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses penyusunan kebijakan masih relatif rendah. Padahal, mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah. Ditinjau dari perspektif Pancasila, kondisi ini berkaitan dengan Sila Keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Nilai tersebut menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan yang akan diterapkan.

V. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap respon mahasiswa Universitas Semarang mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu meringankan beban biaya kuliah dan memenuhi kebutuhan mahasiswa, khususnya dari kalangan menengah. Ketidakpuasan terhadap fasilitas negara dan kurangnya transparansi serta pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan elemen masyarakat kampus. Ditinjau dari aspek Pancasila, kebijakan pemerintah seharusnya mengedepankan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkuat persatuan melalui kebijakan yang inklusif, serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketidaksetaraan akses dan kurangnya dukungan terhadap pendidikan mencerminkan perlunya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan pendidikan tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan keberlangsungan pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan agar mahasiswa dapat berkembang secara optimal dan mampu berkontribusi bagi bangsa di era globalisasi.

3.2 Saran

Dalam rangka memperbaiki keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Universitas Semarang, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah dijalankan, khususnya dalam hal transparansi dan pelibatan mahasiswa. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan elemen kampus agar aspirasi dan kebutuhan mahasiswa benar-benar terakomodasi. Selain itu, peningkatan fasilitas negara dan akses informasi yang mudah mengenai kebijakan pendidikan akan sangat membantu mahasiswa dalam merencanakan masa studinya secara lebih baik. Pihak kampus juga diharapkan aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa sebaiknya diberikan ruang untuk terlibat dalam forum diskusi dan perumusan kebijakan, sehingga mereka bukan hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, Siti. *Buku Ajar Ilmu Negara.* Lamongan: Pustaka Ilalang Grup. 2022.

Prayogo, Rangga Restu, ed. *Peran Kelas Menengah pada Perekonomian Indonesia.* Yogyakarta: The Higher Education Press, Kelompok Penerbit Sasanti Institute. 2020.

Sriharini, Adam Hafidz Al Fajar. 2024. "Strategi Kelas Menengah dalam Menghadapi *Middle-Income Trap:* Analisis Konten *Youtube.* Widya Dharma *Journal of Business*. Vol 03 No 2. Yogyakarta.